

Analisis Film Dirty Vote dan Usaha Menyelamatkan Demokrasi Indonesia di Era Post-Truth

Fidelis Roy Maleng¹, Dominikus Zinyo Darling², Agustinus Agrolis Longko Nadu³

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere

Email : jimimaleng@gmail.com¹ sinyodarling@gmail.com² grolisnadu@gmail.com³

Abstrak

Tulisan ini menyajikan analisis tentang peran film Dirty Vote dalam usaha menyelamatkan demokrasi di era post-truth. Maraknya disinformasi yang terjadi di era post-truth menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Bahkan, praktik manipulasi informasi sudah menjadi model politik yang paling populer di kalangan elite politik Indonesia saat ini. Mereka menyebarkan informasi yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk mempengaruhi opini masyarakat di ruang publik. Dalam situasi ini, kebenaran diabaikan secara sengaja hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Film Dirty Vote adalah suatu upaya yang dilakukan oleh akademisi Indonesia untuk mengangkat berbagai fakta yang terjadi seputar demokrasi Indonesia akhir-akhir ini. Karena itu, penulis melihat bahwa film ini menjadi suatu usaha untuk menyelamatkan demokrasi dengan cara memerangi berbagai disinformasi yang dibuat oleh para elite politik. Dengan mempertimbangkan implikasi praktis dari analisis, tulisan ini juga mengeksplorasi potensi film Dirty Vote sebagai sarana untuk memperkuat partisipasi publik dan membangun kekuatan kolektif dalam menjaga dan menghidupi demokrasi yang sehat.

Kata kunci: Demokrasi ; Post-truth ; film Dirty Vote ;

Abstract

This article presents an analysis of the role of the film Dirty Vote in efforts to save democracy in the post-truth era. The rise of disinformation that occurs in the post-truth era poses a serious threat to the sustainability of democracy in Indonesia. In fact, the practice of manipulating information has become the most popular political model among Indonesian political elites today. They spread information that is manipulated in such a way as to influence public opinion in public spaces. In this situation, the truth is deliberately ignored only for personal and group interests. The film Dirty Vote is an effort made by Indonesian academics to highlight various facts that have occurred regarding Indonesian democracy recently. Therefore, the author sees that this film is an attempt to save democracy by fighting various disinformation created by political elites. By considering the practical implications of the analysis, this article also explores the potential of the film Dirty Vote as a means of strengthening public participation and building collective strength in maintaining and maintaining a healthy democracy.

Keywords ; Democracy ; Post-truth ; the film Dirty Vote ;

1. PENDAHULUAN

Beradu gagasan di ruang publik adalah sebuah tren politik yang terus dimainkan di negara Indonesia. Para elite politik yang dalam keadaan mapan, maupun sedang mencari kemapanan terus bersaing dengan diksi dan retorika untuk menarik dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Namun jika dilihat lebih jauh, praktik politik yang sedang terjadi

di Indonesia sebetulnya sedang berada dalam keadaan yang dangkal dan nihil, hampa akan makna. Elite politik menggunakan ruang publik sebagai instrumen untuk mengekspresikan ambisi pribadi dibandingkan unsur pedagogis dan edukatif yang bisa membantu masyarakat dalam mempraktikkan demokrasi yang berdasar pada kebenaran. Mereka bahkan secara sadar mengacaukan ruang publik dengan berbagai narasi kosong yang sebenarnya jauh dari fakta. Alhasil masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam konstelasi politik, tanpa dasar. Inilah kegalauan besar dari negara demokrasi di era *post-truth*.

Padahal, demokrasi yang sejati mengandaikan adanya keterlibatan aktif warga negara dalam segala aspek politik, mulai dari proses pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.¹ Keterlibatan masyarakat dalam demokrasi yang ideal hanya bisa terwujud apabila masyarakat memiliki basis pengetahuan yang benar. Diyakini bersama bahwa, kebenaran merupakan ciri esensial dari demokrasi. Dengan demikian, kaburnya kebenaran di ruang publik juga menjadi tanda bahwa demokrasi sejati akan segera mati di tanah Indonesia. Pada masa yang akan datang, kita hanya menjalankan sistem demokrasi yang sudah dipreteli dan disistematisasi oleh pihak tertentu yang pandai mengambil simpati di ruang publik. Lebih jauh, demokrasi tanpa kebenaran akan terperosok ke dalam desisionisme. Desisionisme berarti keputusan politik diambil atas pertimbangan kekuasaan semata, tanpa basis argumentasi yang benar dan titik pijak ketepatan (*Richtigkeit*) normatif (moral) yang kokoh.²

Kita perlu menyadari pentingnya kebenaran dalam praktik berdemokrasi terlebih ketika terjadi banyak kesalahpahaman (*misunderstanding*) tentang kebenaran, ketika ada manipulasi kebenaran, ada sikap acuh terhadap banyak kenyataan (*the indifference to facts*), masyarakat dapat dengan mudah percaya pada hal-hal yang absurd, gampang meyakini informasi tanpa sikap kritis (*uncritical acceptance*).³ Kenyataan ini mengharuskan kita untuk menemukan upaya-upaya solutif yang bisa mengembalikan marwah demokrasi, agar praktik tidak menghilangkan konsep serta konsep dikenal dalam praktik. Artinya, ide luhur untuk kemaslahatan bersama sungguh dihidupi dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan, serta praktik-praktik kekuasaan mesti dengan mudah menampilkan suatu ide yang berorientasi pada *bonum comune*. Pola saling membangun ini berdampak pada pengetahuan masyarakat dan memberi stimulus bagi mereka untuk aktif secara positif dalam bernegara.

Penulis melihat, usaha untuk merawat demokrasi dan kesadaran mengawal proses demokrasi sudah tampil dalam film *Dirty Vote* yang dirilis oleh industri perfilman IMDb.com. Sejak pertama kali tampil di media sosial, film ini menuai beragam komentar. Banyak pihak memberikan apresiasi, dan tak sedikit pula yang menaruh kecurigaan, bahkan menganggap film ini sebagai manuver untuk menjatuhkan pihak tertentu. Namun jika dilihat lebih jauh, film ini sebenarnya berisi gerakan inisiatif untuk mengedukasi publik sekaligus menyeruhkan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Tulisan ini hendak

¹ Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik* (Maukere: Ledalero, 2010), hlm. 3

² Otto Gusti Madung, "Demokrasi dan Kebenaran", dalam *Demokrasi Tanpa Demos. Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2021), hlm. 897.

³ Baghi, Felix. "Hak-hak atas Kebenaran dalam Era Masyarakat Pascakebenaran". Paper dibawakan dalam Kelas Rasionalitas Circles Indonesia, pada 23 Februari 2024.

membicarakan lebih jauh tentang peran Film Dirty Vote dalam usaha menyelamatkan demokrasi di era post-truth, suatu masa di mana kebenaran sudah dikacau-balaukan oleh hoaks yang diproduksi secara masal.

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran Film Dirty Vote dalam menggambarkan dinamika politik Indonesia dan tantangan yang dihadapi demokrasi di era post-truth. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis untuk memahami konteks sosial dan politik yang dihadirkan oleh film, serta dampaknya terhadap kesadaran politik masyarakat Indonesia. Metode ini berfokus pada analisis konten film sebagai sumber data utama, serta ulasan dan respons masyarakat terhadap film tersebut sebagai bahan pendukung untuk memahami pengaruhnya. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan Film Dirty Vote sebagai objek utama. Film ini dipilih karena memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi politik Indonesia yang kerap digambarkan oleh fenomena post-truth, di mana kebenaran sering terdistorsi oleh narasi yang lebih menekankan pada kepentingan politik dan emosional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana film ini menyuarakan kritik terhadap praktik demokrasi yang terdistorsi dan bagaimana ia berperan sebagai alat edukasi politik yang mengajak masyarakat untuk kembali pada prinsip-prinsip demokrasi yang berbasis pada kebenaran dan fakta.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Film Dirty Vote itu sendiri, yang akan dianalisis secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga akan mengumpulkan data sekunder berupa ulasan dan respons masyarakat terhadap film tersebut. Ulasan ini dapat ditemukan di berbagai platform media sosial, artikel, dan forum diskusi yang membahas film ini. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menganalisis konten film secara langsung, tetapi juga mengobservasi bagaimana film ini diterima dan dipahami oleh publik. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Film Dirty Vote dalam menggambarkan krisis demokrasi di Indonesia yang dipengaruhi oleh fenomena post-truth. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana film ini berfungsi sebagai alat kritik sosial dan edukasi politik yang mengajak masyarakat untuk kembali menghargai kebenaran dalam proses demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya literasi media dan politik dalam memperkuat demokrasi di era informasi yang semakin kompleks dan penuh distorsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru

Demokrasi Indonesia pernah berada di antara patahan-patahan sejarah yang disesaki dengan konflik, pertentangan hingga pemberontakan politik. Rezim-rezim politik pada setengah abad pertama Indonesia merdeka memiliki corak politik yang unik dalam menyelenggarakan pemerintahan. Zaman orde lama misalnya, sempat menjalankan sistem demokrasi liberal, suatu masa ketika politik bekerja dalam kendali etika. Ada debat publik yang keras, tetapi kehangatan sosial tetap terjalin rapi. Ada berbagai prinsip dalam penyelenggaraan politik, tetapi tidak jatuh dalam fundamentalisme. Waktu itu ruang publik diselenggarakan secara beradab di tangan elite politik yang masih kental dengan semangat merdekanya. Intensi dasar pergaulan politik waktu itu adalah usaha untuk membangun peradaban demokrasi Indonesia.⁴

Idealisme yang dihidupi era demokrasi liberal memang sangatlah diminati oleh masyarakat Indonesia. Sayangnya, era kebebasan itu akhirnya dihentikan ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Hal ini dilakukan karena sistem demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi liberal tidak sesuai dengan UUD 1945 tetapi hanya menggunkan UUDS 1950 di bawah dewan konstituante. Sejak saat itu kita masuk dalam situasi kontrademokrasi: Demokrasi Terpimpin. Tujuan awal dari sistem ini adalah menstabilkan kondisi negara, baik kestabilan politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya. Namun, kemudian terbukti sebagai motif keinginan Sukarno untuk mengendalikan politik ditambah kepentingan militer untuk masuk dalam sistem kekuasaan negara.⁵ Karena sistem ini melegitimasi kekuasaan presiden untuk menguasai berbagai bidang kehidupan negara. Hal itu berarti presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuatan-kekuatan yang menghalanginya. Contohnya, presiden berwenang untuk membubarkan partai dan membatasi kebebasan berpendapat dan berserikat dalam tingkatan tertentu.⁶

Politik kontra demokrasi ini terus berlanjut ke era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Pada awalnya Presiden Suharto menggagaskan suatu sistem demokrasi yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan Indonesia yang kacau balau setelah pemberontakan PKI September 1965. Orde Baru lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dan kebobrokan demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama. Namun, pelaksanaan Demokrasi Pancasila belum sesuai dengan jiwa dan semangat serta ciri-ciri umumnya. Hal itu terjadi karena presiden begitu dominan baik dalam supra struktur maupun dalam infra struktur politik. Akibatnya banyak terjadi manipulasi politik dan KKN

⁴ Seri Buku TEMPO, *Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 139.

⁵ *Ibid.*, hlm. 140.

⁶ Sunarso, *Membeda Demokrasi. Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: UNY Press, 2018), hlm. 75-76.

(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang telah membudaya, sehingga negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan. Situasi ini akhirnya meruntuhkan Orde Baru bersamaan mundurnya Suharto pada tanggal 21 Mei 1998. Rakyat yang dipelopori mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang.⁷

Demokrasi Era Reformasi

Era reformasi lahir sebagai cermin dari sikap bangsa untuk kembali pada sistem ketatanegaraan sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi yang dikonstruksikan sebagai bentuk kesepakatan tertinggi atau bahkan sebagai kontrak sosial bagi seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara. Konstitusi yang bentuk perumusannya dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau fakta tertulis yang tidak hanya terdokumentasi dalam satu-kesatuan naskah, tetapi tercatat dalam naskah sejarah, seperti Piagam Jakarta dan lainnya. Hal ini dilakukan karena konstitusi dianggap sebagai satu-satunya pagar yang bisa melindungi demokrasi dari pihak tertentu yang ingin memonopoli kekuasaan negara berbasis ideologi pribadi atau kelompok.

Konstitusi Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan/atau diberlakukan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan negara. Nilai-nilai itu tidak lain lahir dari refleksi panjang perjalanan bangsa Indonesia. Para penyelenggara negara bertanggung jawab menjalankan kekuasaan sesuai dengan pola berdemokrasi sebagaimana termaktub dalam pasal 27 dan 28 UUD 1945. Tujuan besarnya yaitu menghidupkan kembali terwujudnya jaminan persamaan hak bagi seluruh warga dan kebebasan mengemukakan pendapat dan kesepakatan untuk mewujudkan janji reformasi sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme.⁸ Sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu dalam demokrasi tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

Awalnya konsep kebebasan berdemokrasi itu mengundang optimisme bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pemilu-pemilu relatif bebas dan demokratis sejak tahun 1999 makin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sesudah India dan AS. Namun ironinya, pencapaian berdemokrasi ternyata berbanding terbalik dengan ketidakanggapan negara menegakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Ketika pemilu-pemilu semakin bebas, demokratis, dan langsung, kebobrokan moral para penyelenggara negara sedikit demi sedikit terungkapa pula. Seperti ditulis Larry Diamond sebagaimana dikutip oleh Syamsudin Haris, tak kala hak-hak politik dan kebebasan sipil meningkat pesat dan signifikan dibandingkan Thailand dan

⁷ Mochtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1989), hlm. 138.

⁸ Yunus Nur Rohim, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", dalam *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education* Vol: No.2 tahun 2015, hlm. 161.

Filipina, kualitas tata kelola negara, pemerintahan dan kebijakan, serta penegakan hukum, justru relatif lebih rendah dibandingkan India dan kedua negara di atas.⁹

Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia

Dari generasi ke generasi, hampir semua negara yang menganut sistem demokrasi meyakini bahwa satu-satunya pagar yang bisa menjaga demokrasi dari tangan penguasa otoriter adalah konstitusi. Survei tahun 1999 mendapati bahwa 85 persen orang Amerika Serikat percaya bahwa Konstitusi AS adalah alasan utama Amerika bisa berhasil selama abad ini. Namun optimisme ini tidak berarti bahwa selamanya sarana perlindungan konstitusional itu sendiri memadai untuk mengamankan demokrasi. Konstitusi yang dirancang dengan baik pun kadang gagal. Konstitusi Weimar 1919 Jerman yang dirancang oleh beberapa pemikir hukum terbaik pada masa itu. *Rechtsstaat* (negara hukum) yang sudah berlangsung dan dihargai dianggap banyak orang sudah cukup untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pada akhirnya konstitusi dan *Rechtsstaat* ambruk dengan cepat sesudah Adolf Hitler meraih kekuasaan pada 1933.¹⁰ Kenyataan ini menunjukkan bahwa konstitusi dan hukum justru tidak punya kekuatan apa-apa di bawah pemerintah.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 sah berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam konstitusi, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Celakanya, hukum seringkali diintervensi oleh kekuasaan politik. Itulah yang persis terjadi di Indonesia, betapa tuntutan konstitusi untuk membangun sistem politik yang demokratis ternyata seringkali ditorpedo oleh kekuasaan politik.

Wallace mengatakan, ada satu hal yang lebih berkuasa daripada konstitusi...Itu adalah kehendak rakyat. Artinya, rakyat bisa membatalkan konstitusi bila mau.¹¹ Ironinya, pernyataan ini justru membuka peluang bagi para elite politik untuk mengutak-atik konstitusi. Seringkali kelompok tertentu menjual nama rakyat untuk mengubah konstitusi, seolah-olah yang dilakukan adalah kehendak rakyat. Hal ini nyata di Indonesia ketika Mahkamah Konstitusi (MK) secara kontroversial mengubah suatu pasal besar dalam berdemokrasi. Pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang membatasi usia capres dan cawapres hanya berusia 40 tahun diubah dengan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai capres dan cawapres asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. King Faisal

⁹ Syamsudin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Obor, 2014), hlm. x-xi.

¹⁰ Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati*, penerj. Penerbit PT Gramedia Pustaka (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 79-80.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 23.

Sulaiman menyebut putusan ini sensitif dan beraroma politis serta sarat akan konflik kepentingan terutama kepentingan penguasa.¹² Situasi ini menggambarkan bahwa demokrasi dan konstitusi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

2. Era Pasca Kebenaran (*Posth Truth*) dan Realitas Politik Indonesia

Fenomena Post Truth di Indonesia

Di tengah kemajuan media komunikasi berbasis digital, kebebasan berbicara sebagaimana esensi negara demokrasi seperti Indonesia dihadapkan pada dilema serius. Demokrasi di satu sisi membuka ruang yang bebas bagi setiap ekspresi warga negara tetapi di sisi lain negara pun harus siap menghadapi kenyataan pahit bahwa kebebasan sipil itu kebablasan dan merusak tatanan hidup bersama akibat potensi produksi informasi yang provokatif, tidak benar, terselubung serta sarat ideologi pribadi atau kelompok tertentu. Pada titik ini, informasi yang merupakan fakta-fakta bisa menjadi banjir *farming* yang diproduksi secara bebas.¹³ Di Indonesia, narasi-narasi yang merusak ruang publik berbasis aliran politik dan kepentingan kekuasaan sulit dikendalikan mengingat belum adanya aturan khusus dan konvensional yang efisien.¹⁴

Hasil penelitian Masyarakat Telematika (Mastel) di Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 92,40 % berita hoax diterima masyarakat melalui sosial media seperti facebook, twitter, instagram serta path. Sementara sebanyak 62,80% diterima melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan sebanyak 34,90% melalui situs web. Sementara jika dilihat dari jenis informasinya, peringkat pertama jenis hoaks yang diterima masyarakat terdiri dari sebanyak 91,80% berupa hoaks masalah sosial dan politik, baik itu terkait Pilkada ataupun tentang pemerintah. Kedua, adalah masalah SARA sebanyak 88,60%, Kesehatan sebanyak 41,20%, makanan dan minuman sebanyak 32,60%, penipuan keuangan sebanyak 24,50%, Iptek sebanyak 23,70%, sisanya adalah jenis hoaks seperti berita duka, candaan, bencana alam, serta lalu lintas.

Era pasca kebenaran di Indonesia menggantikan dasar peradaban dan negara yang sehat, yakni kepercayaan dengan dasar yang rapuh yang dipenuhi dengan kecemasan dan kecurigaan. Fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan kepercayaan pribadi. Berbohong karena banyak yang percaya sudah tak lagi dianggap berbohong dan tidak lagi menimbulkan rasa malu/berdosa. Segenap kesalahan/keburukan tertutupi dengan emosi dan kepercayaan masa sehingga fakta objektif disisihkan. Dalam hal ini proses berpikir yang ketat dan sulit pun sering diabaikan. Ketika Indonesia terus dihadapkan dengan fantasi sebagai fakta, masyarakat akan kehilangan landasannya dalam kenyataan, saling curiga dan terpecah belah yang akan merugikan secara

¹² Berita, "Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY", dalam *Universitas Muhamadiyah Yogyakarta*, <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy.html>, diakses pada 27 Februari 2024.

¹³ Paulus Barekama Tukan, "Buzzer Politik Pembajak Demokrasi?", dalam *Jurnal AKADEMIKA* Vol. 20, No. 2, Januari-Juni 2022, hlm. 40.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

politik dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.¹⁵ Upaya perwujudan demokrasi yang tanggap zaman hanya akan menjadi slogan yang mengudara tanpa ada perwujudan dalam realitas masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Menurut Budi Hadirman, demokrasi kita hari-hari ini sedang dalam krisis tiga aspek kebenaran sebagaimana dianalisis oleh filsuf kontemporer, Jürgen Habermas, yakni kebenaran sebagai fakta, sebagai moralitas, dan sebagai autentisitas.¹⁶ Pertama adalah bahwa ide demokrasi itu sendiri mengandaikan kebenaran sebagai fakta. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Kedua, kebebasan berpendapat dalam demokrasi merupakan sebuah ide moral. Kebebasan tidak akan kita miliki jika kebebasan kita diancam oleh kebebasan orang lain. Sebagai ide moral kebebasan menjadi berlebihan jika dipakai untuk membohongi publik atau untuk membenci pihak lain. Demokrasi yang sehat tidak menoleransi intoleransi yang dicetuskan dari kebebasan berpendapat. Ketiga, demokrasi pada hakikatnya adalah komunikasi, dan komunikasi perlu dilandasi kepercayaan timbal balik. Kepercayaan tersebut baru mungkin didapat kalau ada kebenaran sebagai ketulusan. Integritas para politikus dan transparansi publik sangatlah sentral untuk membangun iklim kepercayaan dan respek timbal balik. Politik Pasca-Kebenaran berbenturan dengan kodrat demokrasi. Retorika narsistis yang disebarkannya membelah para pemberi suara menjadi kawan dan lawan. Hal itu meningkatkan iklim ketidakpercayaan timbal balik dan potensi kekerasan. Karena itu negara dan politikus wajib menarik minat para pendukung mereka terhadap kebenaran sehingga peluang terbentuknya ruang publik yang sehat dan iklim demokrasi yang bermartabat menjadi lebih besar.

Post Truth dan Kepentingan Politik

Post-truth menyeruak ke kesadaran publik saat dinobatkan *Oxford Dictionaries* sebagai *word of the year* pada November 2016. Kata ini kemudian menjadi populer saat Pilpres AS 2016 dan Brexit pada 23 juni 2016. Sampai sekarang, istilah ini dipakai karena tidak ada rasa percaya atau keyakinan pada data dan fakta ilmiah, ada anti intelektual, penolakan terhadap rasionalitas berpikir, dan kebohongan yang terang-terangan.¹⁷ Kebohongan yang secara sistematis mengepung ruang publik sampai menuai kepercayaan publik bahwa apa yang mereka sampaikan adalah yang sungguh benar. Dalam peristiwa Pilpres AS, dengan terpilihnya Trump menjadikan frase ini kian dikenal luas. Menurut kubu pemenang Trump, tujuan utamanya adalah menang, jadi kita bohong dulu soal data dan fakta bisa menyusul. Yang terpenting adalah membenaran dan merasa diri benar.¹⁸ Menjadi jelas, permainan politik di negara Demokrasi sekelas AS menomorduakan kebenaran. Lebih parah lagi, kubu pemenang Trump melihat kebenaran sebagai penghambat orientasi politik dan pencapaian kepentingan. Inilah gagasan pada demagog yang selalu bermain di balik payung semantik: kebenaran alternatif, fakta alternatif dan ujungnya hoaks.

¹⁵ Johan Hasan, "Era Pasca-Kebenaran di Indonesia", *Kompas*, 24 April 2018, hlm. 6-7.

¹⁶ F. Budi Hardiman, "Pentingnya kebenaran", *Kompas*, 30 November 2018, hlm. 7.

¹⁷ Lee McIntyre, *Post-Truth* (Massachusetts: MIT Press, 2028), hlm. 1.

¹⁸ Marz Wera, "Meretas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial, dan Populisme Agama", dalam *SOCIETAS DEI: Jurnal Agama dan Masyarakat* Vol. 07, No. 1, April 2020, hlm. 15. Bdk. Setyo Wibowo, "Meneropong Bohong ala Post-Truth", dalam *Majalah Basis*, Nomor 05-06, tahun ke-68, 2019, hlm. 2.

Post-Truth berkembang pesat dimasyarakat yang sudah diwarnai oleh arus informasi yang mengalami ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap politik. Apa yang terjadi dalam post-truth adalah relativisasi kebenaran dengan objektivitas data, manipulasi informasi jauh lebih penting dari pada isi informasi itu sendiri. Dalam era post-truth, narasi selalu mengungguli data atas fakta yang ada.¹⁹ Tom Nicholas dalam bukunya *The death of Expertise* menjelaskan fenomena runtuhnya standar-standar penilaian ilmiah. Euforia media sosial ditandai dengan ketidakmampuan secara kolektif untuk membedakan antara yang informatif dan yang spekulatif, antara yang proporsional dan yang berlebihan, antara yang mengandung kebohongan dan yang layak dipertimbangkan.²⁰

Fenomena post-truth menghadirkan jenis fakta atas suatu peristiwa yang kebenarannya dimanipulasi sedemikian rupa, sesuai dengan kemauan dan kepentingan aktor-aktor yang terikat dengan informasi. Istilah itu muncul seperti patahan dalam demokrasi. Sebetulnya tidak ada kondisi yang begitu cocok untuk mewujudkan ideal-ideal demokrasi, yaitu politik deliberatif, kewarganegaraan yang inklusif, keadilan sebagai fairness, serta partisipasi konstruktif semua pihak, seperti cita-cita awal pendiri bangsa, ketika masyarakat tidak mampu memilah informasi. Kelimpahan informasi seharusnya memperdalam wawasan dan memungkinkan demokrasi ditopang oleh kebenaran dan penalaran publik yang sehat. Akan tetapi, justru persis pada saat ini, ketika akses informasi politik dibuka begitu bebas, orang justru memilih secara bebas untuk merusak fakta dan data. Akhirnya, orang mengapungkan kebebasan sekaligus mengagungkan toleransi atas kesalahan siapapun dengan alibi negara demokrasi.

3. Film Dirty Vote dan Usaha Menyelamatkan Demokrasi di Era Post-Truth

Sekilas tentang Film Dirty Vote

Film dokumenter eksplanatory "Dirty Vote" yang dirilis pada 11 Februari 2024 merupakan karya sutradara Dandhy Dwi Laksono. Film dengan durasi sekitar 1,5 jam tersebut viral di media sosial, bahkan belum dua hari penayangan telah ditonton sebanyak 2 juta tayangan dan trending di media sosial. Film ini berisi kritik atas sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia untuk kondisi terakhir khususnya jelang Pemilu 14 Februari 2024. Film ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ketiga pakar tersebut menjelaskan berbagai kelemahan, manipulasi politik, dan kecurangan yang terjadi dalam sistem Pemilu di Indonesia. Dirty Vote juga menampilkan dugaan ketidaknetralan para pejabat publik, wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik, hingga lembaga-lembaga negara yang melakukan pelanggaran etik.²¹

¹⁹ Ibid., hlm.13

²⁰ Tom Nichols, *The Death of Expertise* (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 90.

²¹ [www.cnnindonesia.com "Dandhy Laksono Jelaskan Sumber Dana Produksi Dirty Vote"](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240212174417-220-1061554/dandhy-laksono-jelaskan-sumber-dana-produksi-dirty-vote), dalam: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240212174417-220-1061554/dandhy-laksono-jelaskan-sumber-dana-produksi-dirty-vote>, diakses pada 27 Februari 2024.

Pembuatan film *Dirty Vote* merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga sipil. Menurut Ketua Umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) sekaligus produser, Joni Aswira, dokumenter itu turut memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil. Biaya produksi film *Dirty Vote*, kata Joni, dihimpun melalui pengumpulan dana (*crowd funding*), sumbangan individu, dan lembaga. “Biayanya patungan. Selain itu, *Dirty Vote* juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan *End Game KPK* (2021).” Kata Joni.²² Sejumlah lembaga yang berkolaborasi dalam film itu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, YLBHI, dan WatchDoc. Film itu diawali dengan menampilkan ucapan Presiden Jokowi mengenai anak-anaknya yang tak tertarik terjun ke dunia politik beberapa tahun lalu dan pada akhirnya jelas berubah saat ini.

Menyuarakan Kebenaran

Sejumlah cerita miring jelang Pemilu 2024 tengah membanjiri ruang publik mulai dari mahar politik, politik uang, insoliditas partai, kampanye hitam, jegal-mencegal hingga sampai pada level ekstim yaitu mengotori ruang publik dengan berbagai kebohongan. Tujaun politik kita beralih dari demokrasi yang mendahulukan kepentingan rakyat menuju mekanisme pargmatis. Tatkala prosedur demokrasi ditelikung oleh kekuatan-keuatan pragmatis terselubung demi keuntungan jangka pendek, bukan saja demi kemenangan calon tertentu melainkan terutama untuk menghentikan langkah calon lain, maka daya produktif demokrasi dikebirikan. Demokrasi tidak sampai menyentuh hal paling substansial yaitu mencapai kemakmuran bersama.

Patut diakui, dalam pemilu kali ini akrobat politik penguasa terjadi sejak sebelum masa kampanye dimulai. Kecurangan semakin menjadi ketika kampanye berlangsung dengan tidak tanggung-tanggung, pelbagai instrumen negara digunakan demi mobilisasi suara. Film *Dirty Vote* mencoba memberikan penjelasan bagaimana praktik lansung sudah didesain secara sistematis sejak awal, menabrak segala aturan tanpa mempedulikan kritik publik, nilai etika dan demokrasi. Sejumlah data dan informasi disajikan dalam film tersebut merupakan potret atas apa yang terjadi belakangan ini.

Satria Unggul Wicaksana Pakar Hukum UM Surabaya menyebut, setidaknya ada beberapa catatan yang perlu disampaikan terkait pesan yang termuat dalam film tersebut.²³ Ada 16 catatan yang disampaikan Satria diantaranya: (a) Gabungan suara Jokowi dan Prabowo di pulau Sumatera menunjukkan gejala politik transaksional antara elit politik, (b)

²² Kompas.com dengan judul "Sutradara Ungkap Alasan Rilis Film "Dirty Vote" di Awal Masa Tenang Pemilu", dalam: <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/12/09463681/sutradara-ungkap-alasan-rilis-film-dirty-vote-di-awal-masa-tenang-pemilu?page=all>, diakses pada 27 Februari 2024.

²³ UM Surabaya "Film *Dirty Vote* Viral Jelang Pemilu, Pakar Hukum UM Surabaya Beri Tanggapan Ini", dalam: <https://www.um-surabaya.ac.id/article/film-dirty-vote-viral-jelang-pemilu-pakar-hukum-um-surabaya-beri-tanggapan-ini>, diakses pada 27 Februari 2024.

Penunjukkan 20 PJ Gubernur dan 82 PJ Walikota/Bupati oleh Presiden Jokowi sebagai praktik politik balas budi dan menciptakan loyalitas pada petahanan, (c) Kasus penunjukan oleh Tito Karnavian untuk Pejabat Gubernur Papua mengabaikan aturan yang ada. Ini melambangkan penguasa yang berlaku sewenang-wenang, (d) Pelanggaran Pakta Integritas oleh Bupati Sorong memperlihatkan tipu daya dan ketidakjujuran pejabat publik, (e) Deklarasi GBK oleh 8 organisasi kepala desa (mewakili 81 juta pemilih) diduga sebagai upaya mobilisasi massa untuk kepentingan politik tertentu, (f) Maraknya kasus korupsi dana desa menguatkan fakta penyelewengan anggaran untuk dukungan politik pada Pemilu. Apalagi ada politik transaksional, (g) Banyaknya tekanan dan intimidasi kepada-kepala desa agar mendukung capres *incumbent* menunjukkan politik ala Orde Baru masih berlangsung, (h) Penyalahgunaan bantuan sosial oleh pejabat seperti Airlangga dan Zulhas untuk kepentingan politik nyata terjadi di lapangan, (i) Peningkatan tajam bansos menjelang Pemilu dibanding masa pandemi mengindikasikan pengaruh politik uang dan pembelian suara, (j) Data *by name by address* Kemensos tidak dipakai dalam penyaluran bantuan menunjukkan indikasi kecurangan, (k) Keterlibatan sejumlah menteri dan timses capres dalam kampanye politik, di luar aturan yang ada, merupakan bentuk pelanggaran netralitas aparatur negara, (l) Ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu, termasuk menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye, melanggar UU dan menodai martabat kepresidenan, (m) Kegagalan Bawaslu mengawasi berbagai pelanggaran Pemilu menunjukkan lemahnya pengawasan independen atas kontestasi politik, (n) Beragam pelanggaran KPU, dari verifikasi partai hingga dianggap berpihak pada parpol tertentu, mencederai integritas penyelenggaraan Pemilu, (o) Banyaknya masalah integritas di MK, seperti benturan kepentingan hingga putusan kontroversial, menodai legitimasi MK sebagai *the guardian of constitution*, (p) Upaya intimidasi dari tim kampanye diharapkan tidak terjadi, aktivitas jurnalisme investigatif adalah bagian dari kebebasan Pers yang dilindungi dalam UU Pers dan kebebasan berpendapat dari prinsip hukum dan HAM.

Usaha paling nyata dari Film ini adalah mengangkat semua persoalan politik jelang pemilu 2024 yang luput dari perhatian masyarakat. Dalam kesederhanaannya, film ini berusaha menghidupkan fakta dan data yang selama ini sudah dimanipulasi oleh oleh pihak tertentu dengan berbagi kepentingan mereka. Patut diakui bahwa, di era post-truth emosi masyarakat sangat mudah dipermainkan. Bahkan persoalan-persoalan penting yang menyangkut hal substansial dalam negara pun dijadikan alibi untuk menipu masyarakat. Mereka tidak tanggung-tanggung memproduksi berbagai narasi hoaks untuk meloloskan praktik buruk mereka dari sorotan publik. Di sini, film *Dirty Vote* hadir untuk menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya di balik lumpuhnya demokrasi saat ini.

Kritik dan Kritis terhadap Kebijakan Pemerintah

Kritik adalah bagian dari dinamika hidup berdemokrasi. Dengan kritik masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam menjaga keutuhan demokrasi. Demokrasi tanpa kritik akan menjadi tirani, dan hal ini sudah pernah hidup dalam sejarah orde baru, dimana Presiden Suharto memberikan kebebasan yang sangat kecil bagi masyarakat bahkan pers dalam menyatakan suara. Singkatnya, jika kritik dimatikan maka demokrasi pun akan terhambat. Alasannya, pertama kritik itu adalah proses dialektis antara masyarakat yang peduli dan

pemerintah yang dengan kebesaran hati menerima aspirasi rakyat. Di sana bukanlah dominasi kekuasaan yang menentukan tetapi kebenaran yang diraih setelah proses antithesis. Kedua, keberanian untuk melakukan konflik argumentatif secara terbuka sehingga dapat dihasilkan kemenangan bagi pihak yang mendasarkan dirinya pada fakta dan bukan berdasarkan intimidasi kekuasaan dari pihak pemerintah. Ketiga, kritik juga bisa dipahami sebagai sebuah respons rakyat atas semua program, kebijakan dan tindakan nyata pemerintah.²⁴

Dalam hal ini, film *Dirty Vote* sungguh telah menunjukkan suatu keberanian serta komitmen yang luar biasa terhadap demokrasi Indonesia. Menghadapi situasi melemahnya daya kritis masyarakat di era post-truth, film ini hadir secara frontal memberikan kritik yang didasarkan pada fakta terhadap semua kebijakan pemerintah. Terutama atas dinamika politik menjelang pesta demokrasi, film ini secara tegas membantu masyarakat untuk menilai semua kebijakan pemerintah terutama yang betendensi menggandeng kepentingan pihak tertentu. Misalnya, terhadap program bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah, *Dirty Vote* menilai itu sebagai model politik “jorok” yang di tontonkan oleh pemerintah yaitu “Politik ala gentong babi Jokowi”. Model politik ini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali dalam pemilu. Presiden Jokowi memang tidak sedang mencalonkan diri, tetapi dalam banyak kesempatan ditunjukkan juga sikap keberpihakan terhadap calon tertentu dengan menggunakan fasilitas negara dan bansos. (Bdk. Film *Dirty Vote* menit 42: 16-43:19)

Label yang diberikan di atas bukanlah sesuatu yang mengambang begitu saja, tetapi didasarkan pada fakta. Banyak bukti dan rekam jejak media ditampilkan dalam film ini. Banyak fakta yang memperlihatkan beberapa menteri secara terang-terangan mengajak masyarakat penerima bansos untuk memilih paslon tertentu. Misalnya dalam kesempatan pembagian bansos, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang mengajak masyarakat memilih Gibran Rakabuming Raka (Cawapres 02). Zulkifli meyakinkan masyarakat bahwa bansos yang sedang mereka terima adalah pemberian dari Presiden Jokowi, padahal bansos adalah hak rakyat atas sila keadilan sosial. Contoh lain, Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam kesempatan pembagian bansos di Mandalika, Lombok, NTB mengajak masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas bansos tersebut. Lebih lanjut ungkapan terima kasih itu berujung pada deklarasi dukungan terhadap paslon 02 (Bdk. Menit 34:07-40:11). Semua bansos ini dinilai hanya bertujuan memainkan emosi rakyat untuk meningkatkan elektabilitas paslon tertentu.

Mereorientasi Partisipasi Politik di Ruang Publik

Demokrasi memerlukan kekuatan *civil society* untuk terus menggerakkan pemerintahan dan melabrak semua bentuk kekuatan tak tampak yang ingin meruntuhkan optimisme kita untuk mencapai hasil yang baik dalam berdemokrasi. Di era post-truth, kekuatan demokrasi itu justru terletak pada pertimbangan publik (*public deliberation*) yang bisa disuaraka oleh masyarakat melalui ruang publik, baik media sosial maupun media masa. Rasio publik, dalam hal ini ‘politik rakyat’ itu menyentu aspek substansial yaitu upaya penegakan hukum

²⁴ Isidorus Lilijawa, *Perempuan, Media dan Politik* (Maukere: Ledalero, 2010), hlm.203-205.

dan bisa menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan negara dari cengkeraman kekuatan tiranik. Adalah suatu bencana besar jika kekuatan ruang publik seperti yang disebutkan diatas tidak disadari dengan baik oleh masyarakat. Sangat disayangkan ketika kita melihat pihak tertentu yang sengaja

Bukan suatu rahasia lagi bagi kita bahwa ruang publik Indonesia akhir-akhir ini hanya dibanjiri oleh algoritma yang menggiring masyarakat dengan informasi-informasi yang tidak selaras dengan fakta. Seperti dikatakan oleh Ralph Keyes dalam bukunya *The post-truth Era*, ruang publik sekarang berisi informasi yang seolah-olah nampak benar meski tidak benar sama sekali.²⁵ Jelang pemilu 2024, permainan juga dimanfaatkan oleh para politisi sebagai suatu cara berpolitik. Gaya berpolitik seperti ini sangatlah buruk, karena membiarkan masyarakat berada dalam ketidaktahuannya dan malahan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat itu untuk meraih kepentingan pribadinya. Padahal, kita yakini bahwa para elite politisi adalah orang yang paham tentang pentingnya kebenaran di ruang publik. Dalam *Nicomachean ethics*, Aristoteles mengungkapkan bahwa orang yang telah belajar banyak tentang cara hidup baik (politik) dituntut untuk mempromosikan kehidupan yang baik itu dalam arena publik.²⁶

Produser film *Dirty Vote* menyadari situasi ini sebagai sesuatu yang sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Jika masyarakat hanya mengonsumsi banyak informasi hoaks yang dibuat oleh para politisi, maka tanpa disadari kita telah masuk dalam sistem demokrasi yang sudah dipreteli oleh pihak tertentu. Hanya saja, kita tetap menggunakan gaya berdemokrasi yang prosedural. Dengan kekuatan penyajian informasi yang kritis dan independen, sejauh ini Film ini telah membantuk untuk membangun kesadaran kritis *civil society* di ruang publik. Demokratisasi selalu mengandaikan masyarakat kritis yang sadar akan hak dan kewajiban mereka. Dalam berbagai kajian paling mutakhir, ekspansi paling progresif demokrasi sama sekali tidak terletak pada proses pelembagaan politik, tetapi terutama berhubungan dengan transformasi supercepat ruang publik dengan basis teknologi informasi.²⁷ Film *Dirty Vote* juga sebenarnya membuka jalan bagi banyak pihak yang peduli dengan demokrasi untuk selalu berjuang menyuarakan kebenaran di tengah situasi krisis ini.

4. KESIMPULAN

Membela demokrasi adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Jika kita memilih demokrasi sebagai metode politik bernegara, maka hal itu mesti bergerak dari level kesadaran setiap pribadi, karena melauinya nasib bangsa dan negara dipikirkan dan didiskusikan secara serius. Akan tetapi, di zaman yang lebih banyak memproduksi kecemasan, kebohongan, ketakutan, kegamangan bahkan ketakwarasan sosial-politik, kita menyaksikan bagaimana demokrasi dibajak dari waktu ke waktu oleh pihak tertentu. Hebatnya, mereka membajak demokrasi Indonesia dengan tetap menggunakan prosedur yang

²⁵ Ralph Keyes, *The Post-Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life* (New York: St. Martin's Press, 2004), hlm. 14-16.

²⁶ Yosef Keladu Koten, *Op.Cit.*, hlm. 133.

²⁷ Sivianus M. Mongko, *Demokrasi Minus Diskursus* (Maukere: Ledalero, 2016), hlm. 115-116.

terlihat demokratis. Alhasil, substansi demokrasi hilang. Demokrasi tidak lagi diperlakukan sebagai metode, tata cara untuk mengelola kekuasaan demi kemakmuran sosial dan pemenuhan hak-hak-hak warga, tetapi demokrasi hanya sebatas cara memburu kekuasaan oleh segelintir orang.

Film *dirty vote* perlu dilihat sebagai suatu upaya kritis yang dibuat oleh akademisi Indonesia untuk membangunkan masyarakat dari arus deras mental gerombolan untuk berdiri sebagai individu yang merdeka dan bermartabat dalam negara. Secara lebih jauh, film *Dirty Vote* adalah suatu upaya untuk memprovokasi kebenaran di era *post-truth*, era di mana kebenaran sudah kehilangan harga diri. Memprovokasi kebenaran tidaklah segampang melarutkan diri dalam kebohongan. Namun, demi kepentingan bersama. Situasi politik Indonesia saat ini memerlukan provokator kebenaran yang berani mengambil jarak dari kenyamanan semu yang diciptakan oleh oknum-oknum anti demokrasi. Film *Dirty Vote* telah menunjukkan sebuah komitmen untuk membangun masyarakat kritis, yang berpegang teguh pada kebenaran untuk berlangsungnya demokrasi dalam arti ideal, yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran film sebagai media yang dapat membangkitkan kesadaran politik masyarakat dalam konteks demokrasi yang semakin terdistorsi oleh fenomena *post-truth*. Sebelumnya, penelitian tentang peran film dalam politik lebih banyak difokuskan pada dampaknya terhadap opini publik dalam skala global atau dalam konteks yang lebih umum. Namun, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan fokus pada Film *Dirty Vote* sebagai upaya konkret dari kalangan akademisi dan pembuat film Indonesia dalam mengkritik dan merevitalisasi demokrasi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh manipulasi informasi dan penyebaran hoaks. Dalam hal ini, tulisan ini berkontribusi pada kajian tentang keterlibatan media dalam pendidikan politik, serta kebangkitan kesadaran kritis masyarakat dalam merespons tantangan demokrasi di era informasi yang sering kali penuh distorsi. Selain itu, melalui analisis yang mendalam terhadap Film *Dirty Vote*, tulisan ini membuka wacana tentang bagaimana media budaya seperti film dapat memainkan peran sebagai agen perubahan sosial, yang tidak hanya mencerminkan realitas politik, tetapi juga mengarahkan pemikiran dan tindakan masyarakat untuk kembali pada prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan berbasis kebenaran. Oleh karena itu, tulisan ini juga menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang potensi film sebagai alat kritik sosial dalam konteks politik Indonesia yang sedang mengalami kemunduran dalam hal transparansi, kejujuran, dan keadilan.

Meskipun tulisan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang peran film dalam demokrasi Indonesia, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, tulisan ini hanya berfokus pada Film *Dirty Vote* sebagai objek studi, yang berarti bahwa temuan-temuan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan fenomena yang lebih luas tentang peran media dalam politik Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini tidak dapat dijadikan representasi tunggal mengenai seluruh spektrum film politik Indonesia, yang tentunya memiliki berbagai cara dan pendekatan dalam mengkritik dan mengedukasi masyarakat. Keterbatasan kedua terletak pada cara pandang masyarakat terhadap film tersebut yang sangat bergantung pada konteks sosial-politik

individu dan kelompok. Respons yang berbeda-beda terhadap film ini, baik dalam ulasan positif maupun negatif, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sangat terpengaruh oleh afiliasi politik mereka. Tulisan ini tidak mencakup analisis mendalam tentang bagaimana latar belakang politik penonton memengaruhi interpretasi mereka terhadap film, sebuah variabel yang dapat membuka pemahaman yang lebih luas mengenai polarisasi politik yang terjadi di Indonesia.

Sebagai langkah penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara Film *Dirty Vote* dengan film-film politik lainnya yang juga mengangkat tema demokrasi dan manipulasi informasi di Indonesia. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai tren penggunaan media, khususnya film, sebagai alat edukasi politik dalam konteks yang lebih beragam. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan dengan melibatkan studi kuantitatif untuk mengukur seberapa besar dampak film terhadap perubahan sikap politik penonton, khususnya dalam hal partisipasi politik dan kesadaran akan pentingnya kebenaran dalam praktik demokrasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Baghi, Felix. "Hak-hak atas Kebenaran dalam Era Masyarakat Pascakebenaran". Paper dibawakan dalam Kelas Rasionalitas Circles Indonesia, pada 23 Februari 2024.
- Gusti Madung, Otto. (2021) "Demokrasi dan Kebenaran", dalam *Demokrasi Tanpa Demos. Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Haris, Syamsusdin. (2014) *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Hardiman, F. Budi. (2018) "Pentingnya kebenaran", *Kompas*, 30 November.
- Hasan, Johan. (2018) "Era Pasca-Kebenaran di Indonesia", *Kompas*, 24 April.
- Keyes, Ralp. (2004) *The Post-Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Live*. New York: St. Martin's Press.
- Koten, Yosef Keladu. (2010) *Partisipasi Politik*. Maumere: Ledalero.
- Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt. (2019) *Bagaimana Demokrasi Mati*. penerj. Penerbit PT Gramedia Pustaka. Jakarta: Gramedia.
- Lilijawa, Isidorus. (2010) *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Ledalero.
- Mas'oed, Mochtar. (1989) *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- McIntyre, Lee. (2018) *Post-Truth*. Massachusetts: MIT Press.
- Mongko, Sivianus M. (2016) *Demokrasi Minus Diskursus*. Maumere: Ledalero.

Nichols, Tom. (2017) *The Death of Expertise*. Oxford: Oxford University Press.

Nur Rohim, Yunus (2015) “Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, *DIDAKTIKA dalam SOSIO: Social Science Education* Vol: No.2.

Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959. (2019) Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Sunarso. (2018) *Membeda Demokrasi. Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.

Tukan, Paulus Barekama Tukan. (2022) “*Buzzer* Politik Pembajak Demokrasi?”, dalam *Jurnal AKADEMIKA* Vol. 20, No. 2, Januari-Juni.

Wera, Marz. (2020) “Meretas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial, dan Populisme Agama”, dalam *SOCIETAS DEI: Jurnal Agama dan Masyarakat* Vol. 07, No. 1, April.

Wibowo, Setyo. (2019) “Meneropong Bohong ala Post-Truth”, dalam *Majalah Basis*, Nomor 05-06, tahun ke-68.

Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. (27 Februari 2024) “Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY”, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy.html>.

www.cnnindonesia.com. (27 Februari 2014) "Dandhy Laksono Jelaskan Sumber Dana Produksi Dirty Vote" <<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240212174417-220-1061554/dandhy-laksono-jelaskan-sumber-dana-produksi-dirty-vote.html>>.,

Kompas.com. (27 Februari 2024) "Sutradara Ungkap Alasan Rilis Film "Dirty Vote" di Awal Masa Tenang Pemilu".<<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/12/09463681/sutradara-ungkap-alasan-rilis-film-dirty-vote-di-awal-masa-tenang-pemilu?page=all>>.

UM Surabaya. (27 Februari 2024) “Film Dirty Vote Viral Jelang Pemilu, Pakar Hukum UM Surabaya Beri Tanggapan Ini” <<https://www.um-surabaya.ac.id/article/film-dirty-vote-viral-jelang-pemilu-pakar-hukum-um-surabaya-beri-tanggapan-ini.html>>.,